

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2004). *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2009). *Langkah Awal Penerapan KPJM Buku 3*. Jakarta: Kemenkeu RI
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2010). *Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011 Dalam Rangka Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah*. Jakarta: Kemenkeu RI
- Fadilla, Aditya F. (2006). *Panduan penulisan referensi akademis Sistem Referensi Harvard*. Jakarta
- Halim, Abdul., dan Kusufi, Muhammad Syam. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., et al. (2014). *Studi Penerapan Medium Term Expenditure Framework dalam Alokasi Belanja Daerah*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khan, Aman., dan Hildreth, Bartley. (2002). *Budget Theory in the Public Sector*. London.
- Hartono, Jogiyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru*. Jakarta: Bappenas.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.
- Maharani, Nadia. (2012). *Analisis Implementasi KPJM dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Sarjana. Depok : Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Andi.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2015*. Bantul: Pemerintah Kabupaten.

- Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2010). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015*. Boyolali: Pemerintah Kabupaten.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2007). *Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2007*. Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015*. Klaten: Pemerintah Kabupaten.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2007, tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.1 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- World Bank. (1998). *Public Expenditure Management Handbook*. Washington, D.C: World Bank.